



UNTUK DISIARKAN SECEPATNYA

MASYARAKAT MULAI MEMBANGUN RUMAH AMAN GEMPA

Satu tahun setelah gempa 30 September 2009

Padang, 18 Oktober 2010 - Gempa 7,9 pada Skala Richter (SR) yang mengguncang Sumatera Barat pada 30 September 2009 yang lalu meninggalkan bekas mendalam bagi Ranah Minang. Empat kabupaten/kota: Padang, Padang Pariaman, Pariaman, dan Agam menjadi lokasi terparah yang merasakan akibat gempa besar tersebut.

Lebih dari 249.000 rumah rusak, terdiri atas 114.000 rusak berat, 67.000 rusak sedang, dan lebih dari 68.000 rusak ringan. Jumlah ini belum termasuk ribuan ruang kelas, ratusan kantor pemerintahan, serta berbagai fasilitas umum lainnya. Gempa ini juga menelan korban 1.195 jiwa meninggal dunia.

Persis pada 30 September lalu, 1 tahun gempa diperingati di Kota Padang dengan peresmian monumen gempa. Roda pemerintahan dan ekonomi Sumbar, terutama daerah-daerah yang terparah akibat gempa sudah berangsur pulih.

Pada bulan Juni lalu, 14 daerah di Sumbar malah sudah melaksanakan pesta demokrasi, Pemilukada dan telah memilih gubernur baru serta kepala daerah baru di 13 kabupaten/kota. Roda pemerintahan sudah berjalan, meski sebagian kantor di Kota Padang harus pindah ke gedung yang lebih aman.

Pembangunan gedung pemerintahan sendiri baru dimulai akhir 2010 ini. Sementara, dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk rumah masyarakat yang rusak berat dan rusak ringan baru turun sebagian kecil pada proyek percontohan. Sebagian besar lainnya juga baru mulai diturunkan akhir tahun ini. Sebesar Rp 2 triliun dana bantuan tahap kedua akan dicairkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Hampir sama dengan penanganan bencana di daerah lain di Indonesia, penanganan gempa di Sumatera Barat menerima berbagai keluhan dari masyarakat. Selain karena lebih lamanya bantuan turun, juga karena ada beberapa persoalan dalam pendataan. Meski demikian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam berbagai kesempatan menyatakan akan memperbaiki berbagai masalah tersebut.

Sementara itu, 730 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Agam, yaitu warga Nagari Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, dan warga Malalak, masih tinggal di penampungan atau menumpang di rumah sanak saudara, karena kampung mereka dinyatakan masuk zona merah yang tidak dapat dihuni lagi. Kondisinya sama dengan 550 KK di Kecamatan Patamuan, Padang Pariaman. Warga yang sudah tidak memiliki tempat tinggal ini direncanakan akan mengikuti transmigrasi di 3 kabupaten di Sumbar, yaitu di Limapuluh Kota, Dharmasraya, dan Sijunjung. Izinnya sedang dalam proses di Kementerian Transmigrasi oleh Pemerintahan Propinsi Sumbar.

Meski masih banyak kendala di lapangan, sebagian kecil warga yang rumahnya rusak dan sudah mendapat bantuan dari pemerintah, sudah mulai membangun. Sebagian warga yang belum mendapat bantuan pun juga sudah membangun. Mereka membangun dengan biaya sendiri atau bantuan dari sanak saudara sambil menunggu turunnya bantuan dari pemerintah.



Sebagian dari warga sudah menerapkan prinsip-prinsip rumah aman gempa yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui fasilitator pendamping masyarakat maupun atas sosialisasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Yayasan IDEP yang gencar berkampanye melalui media massa, film, pembagian buku dan poster petunjuk membangun rumah aman gempa.

Warga yang berpendidikan cukup baik sudah menyadari pentingnya rumah yang aman gempa. Deswandi, Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Komplek Taman Andalusia, Kelurahan Tarantang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang, merupakan salah 1 contoh warga yang sudah memahami pentingnya rumah yang aman. Ia tegas pada anggota kelompoknya untuk menerapkan prinsip-prinsip rumah aman gempa, antara lain penggunaan bahan bangunan yang standar dan berkualitas seperti besi, semen, pasir, serta cara pengolahan bahan yang sesuai standar dengan membuat besi dan komponen bangunan saling mengikat.

Namun belum semua masyarakat yang menyadari pentingnya rumah aman gempa. Menurut Abdul Razak, 33 tahun, pemilik toko "TRB Bangunan" di Jalan By Pass, Kota Solok, masyarakat yang menanyakan bahan berkualitas dan kemudian melaksanakan prinsip-prinsip membangun rumah aman gempa adalah konsumen dari golongan ekonomi menengah ke atas atau golongan terpelajar. Sedangkan sebagian masyarakat belum membangun rumah sesuai prinsip rumah aman gempa karena belum paham, atau sudah paham tetapi sulit melaksanakannya karena faktor biaya.

Meski masih ada masyarakat yang belum paham, terjadi peningkatan pemahaman di tengah masyarakat. Anggin, salah 1 tukang di Kota Padang yang sudah paham dengan rumah aman gempa menyebutkan, saat ini lebih mudah memberi pengertian kepada pemilik rumah agar memilih bahan berkualitas karena mereka sudah merasakan akibat gempa besar pada 30 September lalu.

Ketua Klinik Konstruksi Pusat Studi Bencana Universitas Andalas, Dr. Fauzan, yang ikut bekerja sama dalam kampanye 'Rumah Aman Gempa' juga menyatakan, permintaan masyarakat untuk mendapatkan buku petunjuk membangun rumah aman gempa yang dibagikan gratis klinik tersebut meningkat setelah adanya kampanye rumah aman gempa.

Pemerintah daerah sendiri juga sudah menunjukkan komitmen dan dukungan terhadap rumah yang aman gempa. Pemerintah daerah bersama Yayasan IDEP turut mesosialisasikan rumah aman, baik melalui diskusi di media massa maupun melalui lokakarya fasilitator dan tukang.

Pelaksanaan kampanye rumah aman gempa di Sumatera Barat setahun terakhir pada umumnya terbantu, karena masyarakat sudah melihat sendiri akibat bangunan yang tidak aman gempa. Sehingga sosialisasi rumah aman gempa menjadi solusi menjawab kebutuhan masyarakat untuk rumah yang aman.

Namun wilayah Indonesia yang rawan gempa bukan hanya Sumatera Barat. Bangunan masyarakat yang tidak aman, juga tersebar hampir di seluruh daerah yang rawan terhadap gempa. Untuk itu, sosialisasi yang masif harus dilakukan untuk mencegah korban yang lebih besar di masa mendatang apabila terjadi gempa di daerah rawan tersebut.

Apabila Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai topik ini, silahkan kunjungi www.rumahamangempa.net, atau hubungi Patricia Heny, 0878 6247 9111, MediaUnit@idepfoundation.org

###